

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SECARA DAMAI  
DALAM BENTUK *TAKHARRUJ* DI PENGADILAN  
AGAMA MAKASSAR KELAS I A**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S. H.) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

**ALAUDDIN  
MAKASSAR  
MAKASSAR**

**Oleh:**

**NUR ATIRA ALI  
NIM. 10100114058**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR ATIRA ALI  
NIM : 10100114058  
Jurusan : Peradilan  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Tempat/tgl. Lahir : Bone, 12 Maret 1996  
Alamat : Jl. Veteran No. 7 Sinjai  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam  
Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar  
Kelas I A

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 28 Maret 2018

Penyusun,



NUR ATIRA ALI  
NIM: 10100114058

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SECARA DAMAI DALAM BENTUK *TAKHARRUJ* DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A”, yang disusun oleh Nur Atira Ali, NIM: 10100114058, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 09 April 2018 M  
22 Rajab 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Fatmawati, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.	(.....)

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
Np. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda Ali Musa dan Ibunda Aryani, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudariku yang tercinta beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan Penulis dalam perampungan penulisan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Bapak Drs. Syahidal, selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, dan Bapak Shafar Arfah, S.H.,M.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, dan seluruh pihak Pengadilan

Agama Makassar Kelas I A yang telah membantu memberikan informasi dan memfasilitasi penelitian dalam pengumpulan data Penulis.

7. Kepada saudara-saudariku tercinta, Nur Aima Ali, Muh. Ishaq Ali, Muh. Ikram Ali, Muh Ikhsan Ali, Muh Ihwan Ali, Muh. Ilman Ali, dan Muh. Idham Ali yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2014 Khususnya Syam Sinar, Ervina, Nirmalasari, Mirnawati, Faiza Matong, Ade Ilma Auliana, Fitria Hamdja, Juliana, dan semua teman-teman yang telah memberikan pengalaman selama perkuliahan yang sangat luar biasa, semoga Allah swt. memberkahi setiap langkah di dalam hidup kita;
9. Dan kepada seluruh teman-teman para pejuang skripsi jangan mudah menyerah, Allah swt. senangtiasa bersama kita, dan yang terpenting jangan biasakan menunda, karena waktu tidak akan menunggumu.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 12 Maret 2018

Penulis

NUR ATIRA ALI



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	11-29
A. Tinjauan Umum tentang Kewarisan .....	11
B. Tinjauan Umum tentang <i>Takharruj</i> .....	25
C. Kerangka Konseptual .....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	30-34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Penelitian .....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	33
G. Pengujian Keabsahan Data .....	34
BAB IV PEMBAGIAN WARISAN SECARA DAMAI DALAM	
BENTUK <i>TAKHARRUJ</i> DI PENGADILAN AGAMA	
MAKASSAR KELAS I A .....	35-58
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas I A .....	35
B. Proses Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk	
<i>Takharruj</i> di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A .....	48
C. Kelebihan dan Kekurangan Pembagian Warisan Secara Damai	
dalam Bentuk <i>Takharruj</i> di Pengadilan Agama Makassar Kelas	
I A .....	54



D. Analisis tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk <i>Takharruj</i> di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A .....	58
BAB V PENUTUP.....	62-63
A. Kesimpulan .....	62
B. Implikasi Penelitian .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64-65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِى	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 4. Tā' Marbūṭah

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *س* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## Abstrak

**Nama : Nur Atira Ali**  
**Nim : 10100114058**  
**Judul : Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A?. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana proses pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A?, 2) Apa kelebihan dan kekurangan dari pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A?.

Jenis penelitian ini tergolong *field research kualitatif deskriptif*, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Pendekatan yuridis dan normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data terdapat tiga tahapan: pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* di Pengadilan Agama dilakukan dengan cara: Kedua pihak yang bersengketa menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa atau perselisihannya secara damai berdasarkan kesepakatan, para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri, pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris, bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri, dan sisa yang dijadikan barter atau tebusan dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing. 2) Kelebihan pembagian warisan secara *takharruj* adalah mampu menyelesaikan perkara kewarisan secara damai, menjaga silaturahmi, dan menghindari terjadinya perselisihan yang berkelanjutan diantara ahli waris, serta pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan dan segera dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing ahli waris. Kekurangannya adalah tidak dijelaskannya kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris yang seharusnya diterima dalam akta perdamaian dan tidak ada pernyataan kerelaan untuk memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya pada akta perdamaian tersebut.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi Pemerintah, diharapkan lebih menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan, dan perlu adanya sosialisasi terkait penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah atau mufakat agar sengketa yang terjadi di masyarakat khususnya kewarisan dapat segera terselesaikan. 2) Bagi Mediator, dalam proses mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama sebaiknya mediator benar-benar menjalankan fungsinya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara mengenai harta warisan, agar ahli waris dapat berdamai dalam pembagian harta warisan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam merupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah swt. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat dan kudrat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan karena itu kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.

Di antara hubungan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya dan berapa jumlahnya serta bagaimana cara mendapatkannya.

Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan tidak akan terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan menghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan. Kematian merupakan peristiwa hukum, tidak hanya kepada orang yang akan menjadi ahli waris, tetapi juga kepada harta yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Manusia tidak jarang lupa karena masalah harta, manusia tidak jarang lupa bahwa harta itu merupakan suatu cobaan yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Puncak cobaan harta manusia akan terjadi ketika dia meninggal dunia. Seberapa jauh dia dapat mendidik anak-anaknya dalam membagi waris.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> H.R. Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Mediatama, 2006), h. 2.



Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat diperlukan aturan atau hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dan sesamanya. Manusia tidak dapat hidup tanpa aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya.

Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.<sup>2</sup> Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kemudian Perubahan Kedua yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan INPRES Nomor 1 tahun 1991 yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam kini telah menambah khasanah hukum positif Indonesia, baik untuk kepentingan hukum bagi umat Islam maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Keberlakuannya tentu membawa manfaat bagi para pencari keadilan serta menjadi tonggak keberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu dengan menggunakan dalil-dalil berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Artinya umat Islam telah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sebagian syariat Islam dalam hukum positif. Dilihat dari segi hukum

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1995) , h. 10.

positif dengan di berlakukannya Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam masyarakat dapat diberikan pilihan dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu seperti kewarisan. Apakah mereka akan menggunakan hukum Islam atautkah hukum adat sebagai acuannya.

Pada dasarnya hukum kewarisan menyangkut tiga hal, yakni pewaris, harta peninggalannya dan ahli waris. Apabila dikaitkan dengan sisi kemaslahatan manusia serta apabila terjadi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam ataupun di Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam di Indonesia, tidak lagi pada tataran penentuan ahli waris, harta warisan dan besarnya pembagian masing-masing, tetapi sampai kepada pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:<sup>3</sup>

- a Perkawinan;
- b Waris;
- c Wasiat;
- d Hibah;
- e Wakaf;
- f Zakat;
- g Infak;
- h Sedekah; dan
- i Ekonomi Syariah.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Pembagian warisan dalam Islam memiliki kedudukan penting karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia dan apabila terjadi suatu kematian maka akan timbul akibat hukum, yaitu tentang pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan juga sangat rentan menimbulkan perselisihan terutama di antara para ahli waris, khususnya dalam pembagian harta warisan.

Dalam praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan para ahli waris. Kecenderungan manusia yang berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusnya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. Dalam QS. al-Nisa'/4 : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ

Terjemahnya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Ada saja persoalan dalam kewarisan yang sering menimbulkan sengketa, namun tidak jarang pula pembagian harta warisan dilakukan dengan jalan damai (*islah*) antara para ahli waris. Penyelesaian masalah kewarisan Islam ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>5</sup> Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dibatasi khusus bagi orang-orang yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan Islam.

Pada perkara perdata, wajib bagi majelis hakim untuk mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara (Pasal 154 Rbg./130 HIR), bahkan Mahkamah Agung RI mengintensifkan proses perdamaian dengan cara memasukkan proses mediasi ke dalam prosedur beracara di Pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut Hukum

---

<sup>4</sup> Harijah Damis, *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai* (Jakarta: MT.Al-Itqon, 2012), h. 128.

<sup>5</sup> Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 10.

Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya diantara para ahli waris.<sup>6</sup>

Terkadang dalam keadaan tertentu ahli waris merasa pembagian warisan 2 : 1 tidak adil atau kurang cocok untuk diterapkan. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara kewarisan dikenal istilah *takharruj*, yaitu salah satu bentuk pembagian warisan secara damai dimana proses pembagiannya lebih mengutamakan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli waris, namun tidak boleh diartikan sebagai usaha jalan keluar dari hukum Allah.<sup>7</sup>

Bila dikaitkan dengan aturan hukum Islam, pembagian warisan dalam bentuk *takharruj* sangat mungkin akan menyimpang dari ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an yang mengutamakan prinsip keadilan dimana laki-laki mendapat 2 bagian, dan perempuan memperoleh 1 bagian. Karena dalam pembagiannya para ahli waris lebih berperan dalam menentukan cara maupun besarnya pembagian dan tidak terlalu mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadits.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”**.

---

<sup>6</sup> Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafik, 2003), h. 25.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (cet. 4; Jakarta: Kencana, 2012), h. 302.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj*”. Peneliti akan meninjau bagaimana Proses pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* serta apa kelebihan dan kekurangan pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* tersebut.

### **2. Deskripsi Fokus**

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, maka penulis menganggap perlu menguraikan pengertian beberapa istilah pokok dalam kajian ini agar persamaan persepsi dapat diperoleh sebagai kejelasan pemahaman terhadap hal-hal yang akan dibahas. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau penerapan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- b. Warisan adalah berpindahnya hak seorang pewaris setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam.
- c. Damai adalah suatu keadaan kehidupan antar manusia di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik yang terjadi di dalamnya.
- d. *Takharruj* secara arti kata berarti saling keluar. Dalam arti terminologis, *takharruj* biasa diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 296.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah yaitu “Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”. Agar pokok masalah yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas, yaitu:

1. Bagaimana Proses Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A?
2. Apa Kelebihan dan Kekurangan dari Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A?

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam Penyusunan karya ilmiah dibutuhkan referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dalam pembahasan yang akan diteliti, sebelum melakukan penelitian, penulis telah mengkaji beberapa literature yang masih berkaitan dengan judul skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Rasdiana, dalam skripsinya “*Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga*”, 2015. Inti dari skripsi ini adalah bahwa dalam Hukum Islam memerintahkan agar sesegera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila telah selesai diselenggarakan pengurusan jenazahnya, agar supaya tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik internal bagi para ahli waris. Bilamana hal tersebut terjadi, maka penyelesaian yang tepat adalah melalui lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama;



2. Suhrawardi K. Lubis, dalam bukunya "*Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*", 2004. Dalam buku ini selain membahas tentang pentingnya belajar hukum waris, buku ini juga membahas tentang pengertian, dasar hukum, kedudukan, hingga skema dan rumus dalam pembagian warisan;
3. Amir Syarifuddin, dalam buku "*Hukum Kewarisan Islam*", cet ke-4, 2012. Dalam buku ini mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu, dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah, dan uang. Di antara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, yang lain membutuhkan tanah, dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan, mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu;
4. Dr. Supardin, M.H.I. dalam buku "*Fikih Peradilan Agama di Indonesia*", cet ke-1, 2014. Dalam buku ini selain membahas tentang sistem hukum peradilan, teori-teori pemberlakuan hukum Islam, eksistensi peradilan agama, buku ini juga membahas tentang rekonstruksi materi perkara tertentu peradilan agama di Indonesia;
5. Amin Husain Nasution, M.A. dalam buku "*Hukum Kewarisan suatu Analisis Komperatif pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*", 2004. Dalam bukunya menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak yang disebut dengan istilah "*Tarikah/Tirkah*". *Tarikah/Tirkah* ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris;
6. Sumber lain seperti, Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang Hukum Kewarisan bab I pasal 171-193, Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Waris pasal 830-1130 KUH Perdata;



Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satupun yang membahas mengenai masalah “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”. Oleh karena itu saya sebagai penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini lebih jauh yang akan dibentuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk Mengetahui Proses Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.
- b. Untuk Mengetahui Kelebihan dan Kekurangan dari Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj*. Di samping itu dapat menjadi bahan acuan bagi yang akan meneliti lebih luas masalah tersebut.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehubungan dengan pembagian warisan secara damai dalam bentuk *tahkarruj* di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Makassar kelas IA.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Tinjauan Umum tentang Kewarisan

##### 1. Pengertian Hukum kewarisan

Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an dan dirinci dalam sunnah Rasulullah saw. hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti (QS. Al-Naml/27 :16), artinya *Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua*, memberi (QS. Al-Zumar/39 : 74), dan *ketiga*, mewarisi (QS. Maryam/19 : 6).<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*)<sup>10</sup> pewaris,<sup>11</sup> menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris<sup>12</sup> dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa "Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 281.

<sup>10</sup> Harta peninggalan (*tirkah*) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun baik hak-haknya (Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya ditulis KHI, Buku I, Bab I pasal 171 huruf d).

<sup>11</sup> pewaris (*al-muwarrusts* dalam istilah fiqih) adalah: "orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (KHI, Buku II Bab I pasal 171 huruf b).

<sup>12</sup> Ahli waris (*al-warits*) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (KHI, Buku II Bab I pasal 171 huruf c).

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

### a. Al- Qur'an

#### QS. al-Nisa'/4 : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

#### QS. al-Nisa'/4 : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Solo: Abyan, 2014), h. 78.

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>14</sup>

#### QS. Al-Nisa'/4 : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ<sup>١٢</sup>

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang

<sup>14</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Solo: Abyan, 2014), h. 78.

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>15</sup>

#### QS. Al-Nisa'/4 : 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ<sup>١٧٦</sup> يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>١٧٦</sup>

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>16</sup>

#### b. Hadits Nabi M A K A S S A R

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَقُّوْا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ". (رواه البخارى)

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Solo: Abyan, 2014), h. 79.

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Solo: Abyan, 2014), h. 106.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR Bukhari).<sup>17</sup>

Pada hadits tersebut, Rasulullah saw. memerintahkan agar memberikan harta warisan terlebih dahulu kepada ahli waris yang telah mempunyai bagian tertentu tanpa menyebut secara rinci ahli waris yang dimaksud dan sisanya adalah untuk ahli waris yang lebih dekat adalah ahli waris yang termasuk kelompok *asabah*.

#### **c. Ijma'**

Ijma' yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat, atau ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah saw.

#### **d. Ijtihad**

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad disini merupakan penerapan hukum bukan untuk pemahaman atau ketentuan yang ada.

---

<sup>17</sup> Konsultasi Waris Islam, *Ayat dan Hadist Sumber Rujukan Pembagian Warisan Secara Islam*, <http://www.jadipintar.com.Ayat-dan-Hadits-Sumber-Rujukan-Pembagian-Waris-Secara-Islam.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017 Pukul 17.20 WITA.

### 3. Rukun Waris

Adapun yang menjadi rukun waris menurut hukum Islam antara lain sebagai berikut:

#### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia. Kematian pewaris menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mati *haqiqy* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan).<sup>18</sup>

#### b. Ahli Waris

ialah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan dan sebagainya.

#### c. Harta Warisan

ialah suatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta bergerak dan tidak bergerak. Harta warisan juga kerap kali disebut *Irtisan*, *miratsan*, *turatsan* dan *tirkatan*. Semuanya bermakna sama, yakni harta yang ditinggalkan oleh orang mati untuk ahli warisnya.<sup>19</sup>

### 4. Sebab-sebab Mendapat Warisan

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika, 2009), h. 60.

<sup>19</sup> Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam* (Cet. 1; Bandung: CV. DIPONEGORO, 1995), h. 47.



**a. Karena hubungan perkawinan**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah: suami atau istri dari si mayat.

**b. Karena hubungan darah**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.<sup>20</sup>

**c. Karena hubungan *Wala'***

*Wala'* yaitu pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seseorang hamba kemudian orang yang dimerdekakan itu menjadi kaya. Jika hamba yang dimerdekakan itu meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya dahulu berhak mendapatkan warisan. *wala'* yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum ini, dapat disebut juga *Wala'ul Itqi* dan tau *Walaa'un ni mah*. Hal ini disebabkan karena pemberian kenikmatan pemberian kepada seorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai budak sahaya.<sup>21</sup>

Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimiliki hamba sahaya tersebut, berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut *Wala'ul Itqi*. Orang yang memerdekakan hamba sahaya karena *Wala'ul Itqi* ini dapat mewarisi harta peninggalan dari hamba sahaya yang telah dibebaskannya jika si hamba tersebut telah menjadi kaya. Hal ini ditentukan oleh

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis. Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 52.

<sup>21</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris* (Solo: CV. PUSTAKA MANTIQ, 1994), h. 36.



syariat Islam sebagai balas jasa terhadap perbuatan mulia tersebut. Warisan itu dapat diperoleh jika orang yang dimerdekakan tersebut tidak mempunyai ahli waris, *dzawil arbam* atau suami istri.

**d. Karena sesama Islam**

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

**5. Syarat-syarat Mendapat Warisan**

Hak waris seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang telah meninggal dunia.<sup>22</sup> Adapun syarat-syarat mendapat warisan yakni:

**1. Seseorang dinyatakan meninggal secara hakiki maupun secara hukum.**

Seseorang tidak mungkin dibagi harta warisannya sebelum kematiannya diketahui secara pasti atau sebelum hakim memutuskan orang tersebut telah meninggal, seperti terhadap orang hilang yang tidak diketahui hidup atau matinya.

Apabila hakim telah menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal berdasarkan beberapa petunjuk, maka harta waris bias dibagi (dalam hal ini ada pembahasan tersendiri). Jadi, syaratnya adalah seseorang secara pasti telah meninggal atau atas pertimbangan hukum. Selama masih hidup, manusia dapat menggunakan harta miliknya karena hak miliknya masih tetap dan belum hilang, sebab itu orang lain tidak boleh menggunakannya. Sebaliknya, bila dia sudah meninggal dan tidak mampu lagi menggunakan hak miliknya, maka hak milik itu hilang dan berpindah kepada ahli warisnya.

---

<sup>22</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h.18.

## **2. Ahli waris secara jelas masih hidup ketika pewarisnya meninggal**

Ahli waris bisa mengganti kedudukan pewaris setelah pewaris tersebut diketahui telah meninggal, barulah kemudian harta berpindah kepadanya dengan jalan warisan. Dengan demikian, ahli waris harus ada ketika orang tersebut meninggal, agar hak pemilikan harta tersebut menjadi jelas. Sebab, orang meninggal tidak berhak lagi memiliki harta, baik dengan jalan warisan maupun dengan jalan lainnya.

Agar lebih jelas, kita ambil contoh berikut, jika dua orang berkerabat atau lebih meninggal, mereka saling mewarisi, tetapi jika tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, maka diantara mereka tidak terjadi saling mewarisi dan tidak ada pemberian hak milik. hal yang sama berlaku bila seorang anak meninggal bersama ayahnya dalam kecelakaan pesawat terbang, atau kapal laut, atau tertimpa reruntuhan atap sebuah rumah. Maka, dalam hal ini tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Akhirnya, yang mewarisi harta mereka adalah ahli warisnya yang masih hidup.

Penjelasan ini merupakan keterangan dari perkataan ulama fikih, “tidak ada saling mewarisi di antara orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terbakar dan orang-orang yang tertimpa reruntuhan.” Demikianlah, syariat Islam yang cemerlang telah menetapkan.

## **3. Mengetahui golongan ahli waris.**

Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus diketahui secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami atau istri, anak kandung, saudara kandung, dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam menentukan pembagian warisnya. Besarnya bagian waris akan berbeda jika hubungan dengan pewaris berbeda. Seseorang akan mendapat bagian pokok, sedangkan yang lainnya

akan mendapat bagian sisa dan seseorang bias terhalang oleh ahli waris lain sementara yang lainnya tidak.

## 6. Sebab-sebab Terhalang mendapat Warisan

Diantara ahli wari, ada yang terhalang mendapat harta warisan karena beberapa sebab:<sup>23</sup>

### 1. Pembunuhan

Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya, hal ini berdasarkan sabda nabi Muhammad saw.:

وَعَنْ عُمَرَ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر)

Artinya:

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh." (HR An-Nasai dan Daruqathni, yang dikuatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar).<sup>24</sup>

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 173 KHI yakni, "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;

---

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan islam di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 30-31.

<sup>24</sup> Halim Prancak, *Pembunuhan Pencegah Terjadinya Waris*, <http://halimprancak.blogspot.co.id/2012/01/pembunuhan-pencegah-terjadinya-waris.html>, diakses pada tanggal 9 April 2018 Pukul 16.40 WITA.

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

## 2. Orang Kafir

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad saw.:

“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” (HR. Jama’ah). Dan hadis lain yakni: “Tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda” (HR. Ashhab Sunan). Dan firman Allah swt., dalam surah al-Nisa’/4 : 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝١٤١

Terjemahnya:

.... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.<sup>25</sup>

## 3. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cukup hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Firman Allah swt. dalam surah al-Nahl/16 : 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Terjemahnya:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Solo: Abyan, 2014), h. 102.

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Solo: Abyan, 2014), h. 276.

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada.

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sehingga perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum berupa tebusan) bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf (QS. al-Nisa'/4 : 92). Ini karena Islam menghendaki agar tidak ada lagi perbudakan dimuka bumi ini.

## **7. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam**

Menyangkut asas-asas kewarisan hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad saw. Asas-asas yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### **a. Asas Ijbari**

Secara erimologis kata “ijbari” mengandung arti “paksaan” (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti “terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut’.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian pula halnya dengan si pewaris).

Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Dari segi peralihan harta;
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih;

c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Ketentuan asas ijabari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa: "Bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada '*nasib*' dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya." Kata '*nasib*' dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.<sup>27</sup>

#### **b. Asas Bilateral**

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini secara tegas dapat dalam ketentuan al-Qur'an surah al-Nisa' 4 : 7, 11, 12, dan 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seseorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.

#### **c. Asas Individual**

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang di jumpai dalam ketentuan hukum adat).

Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu

---

<sup>27</sup> Suhrawardi K. Lubis. Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* h. 36.

masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan al-Qur'an surah al-Nisa' ayat yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

#### **d. Asas Keadilan Berimbang**

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa factor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hal kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebakakan). Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan al-Qur'an surah al-Nisa'/4 : 7, 11, 12, dan 176.

#### **e. Asas Semata Akibat Kematian**

Asas akibat kematian adalah asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan sebagai akibat kematian seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat kewarisan *ab intestate* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang. Hukum kewarisan Islam, karena itu, tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena pengangkatan atau penunjukan dengan surat wasiat yang

dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata Barat kewarisan melalui *testamen*.

Asas ini mempunyai kaitan dengan asas *ijbari* yakni seseorang tidak dapat sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang *Takharruj***

### **1. Pengertian *Takharruj***

*Takharruj* berasal dari kata (خرج-يخرج-خارج) *kharaja*, *yakhruju*, *khuruujan* dengan makna keluar, dengan timbangan *tafa'ul* (تفاعل), yaitu (تخرج - يتخرج) *takharaja*, *yatakharrju*, *takharujan* dengan makna saling keluar.<sup>29</sup>

Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris lainnya.

*Takharruj* adalah salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai berdasarkan musyawarah para ahli waris. *Takharruj* adalah pengunduran diri seorang atau beberapa ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya meminta imbalan berupa uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya.

### **2. Dasar Hukum *Takharruj***

Pembagian harta warisan dalam bentuk takharuj tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dasar hukumnya merupakan hasil

<sup>28</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 146.

<sup>29</sup> Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia* (Cet. 1; Surabaya: PUSTAKA PROGRESIF, 1999), h. 140.



ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Atsar tersebut sebagai berikut:

عن أبي يوسف عن حدثه عمرو بن دينار عن ابن عباس : ان حدى نساء  
عبدالرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة وثمانين الفعلى اخرجوها من ميراث.

Artinya:

“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”.<sup>30</sup>

Dari atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta warisan dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran atau sejumlah delapan puluh tiga ribu. Penyelesaian secara takharuj adalah bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Hal ini dilakukan tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt. dengan cara ini suatu kesulitan dalam pemecahan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>31</sup>

Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian warisan yang telah

---

<sup>30</sup> Shekh Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Cet. 1; Bandung: TRIGENDA KARYA, 1995), h. 184.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, BAB III Pasal 183.

ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam namun hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan diantara para ahli waris.

### **3. Bentuk-bentuk *Takharruj***

Ada beberapa bentuk *takharruj*, yaitu:

#### **1. Dari segi waktu pelaksanaan, ada dua bentuk:**

##### **a. Sebelum harta warisan dibagi**

Artinya kesepakatan yang dilakukan oleh ahli waris dilakukan sebelum dilaksanakannya pembagian harta warisan menurut ketentuan faraid secara formal. Ini berarti ahli waris berkeinginan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

##### **b. Sesudah harta warisan dibagi**

Artinya *takharruj* dilakukan setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut ketentuan syara' secara formal dan masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing.

#### **2. Dari segi kesepakatan ahli waris**

Dalam hal ini, ada dua bentuk *takharruj* yaitu:

##### **a. Kesepakatan dilakukan oleh satu orang atau sebagian ahli waris dengan ahli waris yang akan keluar.**

##### **b. Kesepakatan dilakukan oleh seluruh ahli waris.**

#### **3. Dari segi imbalan yang diberikan**

Dalam hal ini ada tiga bentuk:

##### **a. Imbalan diberikan dari harta salah seorang ahli waris yang melakukan kesepakatan.**

##### **b. Imbalan diberikan dari harta seluruh ahli waris yang melakukan kesepakatan.**

- c. Imbalan diberikan dengan mengambil bagian tertentu dari harta warisan.<sup>32</sup>

Bila diperhatikan, bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda dengan dua bentuk sebelumnya karena ahli waris menempuh cara pembagian yang menyimpang dari yang ditentukan dalam hukum kewarisan dan ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima.

Walaupun pembagian warisan dalam bentuk *tahkarruj* dibenarkan dalam Islam namun praktik pembagiannya harus tetap memenuhi syarat-syarat. Diantara syarat-syarat pentingnya adalah harus ada kecakapan hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam warisan. Hal ini menjadi keharusan karena dalam pembagian warisan dalam bentuk *tahkarruj* ada pihak-pihak yang akan menggugurkan atau mengorbankan haknya baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam menggugurkan hak milik diperlukan kecakapan untuk bertindak secara hukum.

### C. Kerangka Konseptual





## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Peneliti adalah *field research*, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi, serta menemukan fakta-fakta di lapangan yang terkait dengan penelitian ini.

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan, Daya, Makassar. Yang akan menjadi informan pertama dalam penelitian ini akan ditentukan sendiri oleh peneliti sampai akhirnya semua data yang diperlukan guna untuk mendalami pembahasan yang akan diteliti.

#### B. *Pendekatan Penelitian*

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis formal, yaitu cara mendekati masalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Peradilan Agama, KHI, dan aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. pendekatan teologi normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sudah sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Norma yang dijadikan tolak ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam yaitu Al-Qur'an, hadis-hadis, dan ijtihad ulama.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama yang dilakukan secara langsung melalui *field research* atau penelitian lapangan meliputi wawancara atau observasi dengan para informan penelitian agar mendapat keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti al-Qur'an, buku-buku, jurnal, literatur-literatur hukum, internet, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Kajian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul, baik dari Undang-Undang, buku-buku maupun literatur-literatur lainnya.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengadakan pengumpulan data dengan terjun langsung di lapangan penelitian, dengan menggunakan teknik penyaringan data sebagai berikut:
  - a. Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, yaitu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini tentang pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharuj*, dengan cara pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek atau

tempat penelitian. Dalam hal ini adalah melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar.

- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yang pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mempunyai informasi mengenai pembahasan yang sedang dilakukan.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Mediator di Pengadilan Agama Kelas I A kota Makassar terkait dengan proses pembagian warisan dalam bentuk *takharuj*, serta kelebihan dan kekurangannya.

#### **E. *Instrument Penelitian***

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi *instrument* atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diujivalidasi”. Uji validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

#### **F. *Teknik Pengelolaan dan Analisis Data***

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Pada bagian ini dikemukakan Teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan.

Dalam penelitian kualitatif ini, perlu ditegaskan teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan. Untuk menganalisis data dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu penulis menggunakan rumusan atau ketentuan yang bersifat umum untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya dari suatu ayat atau dalil lainnya yang pada lahirnya bersifat umum, kemudian penulis menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat khusus, kemudian mengambil kesimpulan yang lebih umum.
3. Metode Komperatif, yaitu penulis membandingkan beberapa data dari studi literatur dan studi lapangan yang berhubungan dengan pembahasan, setelah itu penulis mencari persamaannya atau perbedaannya, kemudian menarik suatu kesimpulan.

#### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data



yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.



## **BAB IV**

### **PEMBAGIAN WARISAN SECARA DAMAI DALAM BENTUK TAKHARRUJ DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A**

#### ***A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar***

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Makassar**

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqah, dan Ekonomi Syariah diantara orang-orang islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel). Disamping Peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk peradilan khusus.

Undang-Undang RI Nomor 7 ini disahkan dan diundangkan tanggal 29 Desember Tahun 1989 ditempatkan dalam lembaran Negara RI nomor 49 tahun 1989 dan tambahan dalam lembaran negara nomor 3400. Isi dari Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 terdiri atas tujuh bab, meliputi 108 pasal. Ketujuh Bab

tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

**a. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957**

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

**b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957**

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah”.

**2. Letak Geografis**

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m<sup>2</sup> untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 1.887,5 M<sup>2</sup> .

**3. Luas Wilayah**

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelat Timur berbatasan dangan kabupaten Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar



## 5. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kelas I A Makassar

a. Visi

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI HUKUM.”

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah:

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

b. Misi

- Pertama

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih,

berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman".

- Kedua

“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk:

- 1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
- 3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan"

- Ketiga

“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum”.

- Keempat

“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain”.

## 6. Deskripsi Uraian Kerja

Penyusunan Alur Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

### 1) Ketua

- Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.
- Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
- Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama.
- Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- Mengadakan rapat dinas.
- Menetapkan rumusan Pengadilan Agama.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.



- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dilingkungan Pengadilan Agama.
- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- l. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara.
- m. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi suatu keputusan.
- n. Mengitsbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di Pengadilan Agama.
- o. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi penyempahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- p. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Agama.

## 2) Wakil Ketua

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.
- b. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
- c. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama.
- f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Mengadakan rapat dinas.
- h. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama.
- i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
- k. dilingkungan Pengadilan Agama.
- l. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- m. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukansidang perkara.
- n. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu keputusan.
- o. Mengitsbatkan dan menentu tim hisab rukyat hilal di Pengadilan Agama.
- p. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- q. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- r. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan Agama.
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

### 3) Hakim

- a. Menjadi Ketua atau Anggota Majelis sidang atas penunjukan Ketua Pengadilan Agama.
- b. Meneliti dan mempelajari berkas yang akan disidangkan.
- c. Sebagai mediator terhadap pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi kepada pihak yang berperkara.
- d. Membantu Hakim Ketua Sidang dalam meyelesaikan konsep putusan/penetapan Pengadilan Agama.
- e. Membantu Hakim Ketua Pengadilan Agama dalam bidang hukum Syara Hisab dan rukyat.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pengadilan Agama.

- g. Dalam pelaksanaan tugas, hakim bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama.
- h. Hakim anggota pertama pada satu majelis, mengkonsep putusan/penetapan dan hakim anggota kedua, memeriksa berita acara sidang.

#### **4) Panitera/Sekretaris**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan /kesekretariatan.
- b. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan /kesekretariatan.
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Kepaniteraan /Kesekretariatan.
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kepaniteraan/ Kesekretariatan.
- f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Mengadakan rapat dinas.
- h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang Kpegawaian/Kesekretariatan.
- i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang Kepaniteraan/Kesekretariatan.
- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- l. Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab rukyat.
- m. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan / kesekretariatan.

### 5) Wakil Panitera

- a. Memberikan pelayanan teknis di bidang Administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi perkara baik mengenai pendaftaran perkara/persidangan, pengaturan arsip perkara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara.
- c. Bertanggung jawab terhadap penyusunan statistik dan dokumentasi pengadilan serta pelayanan dibidang hukum syara, pelayanan sumpah, hisab dan rukyat.
- d. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas.
- e. Sebagai koordinator Jurusita Pengganti dan bertanggung jawab langsung atas kelancaran pelaksanaan tugas meja III.
- f. Menjadi Panitera sidang atas penunjukan panitera.
- g. Mengadakan rapat-rapat berkala baik sebagai pejabat fungsional maupun dengan seluruh pegawai yang menjadi bawahannya.
- h. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga hisab rukyat setempat.

### 6) Wakil Sekretaris

- a. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- b. Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan.
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kesekretariatan.
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kesekretariatan.

- f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Mengadakan rapat dinas.
- h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang Kesekretariatan.
- i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang Kesekretariatan.
- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- m. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Kesekretariatan.
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris/Ketua Pengadilan Agama.

#### **7) Panitera Muda Gugatan**

- a. Melaksanakan administrasi perkara gugatan.
- b. Mempersiapkan persidangan perkara gugatan untuk itu harus mengadakan koordinasi dengan Panitera Pengganti perkara gugatan.
- c. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan.
- d. Dan tugas lain yang berhubungan perkara perdata gugatan.

#### **8) Panitera Muda Permohonan**

- a. Melaksanakan administrasi perkara permohonan.
- b. Mempersiapkan persidangan perkara permohonan untuk itu harus mengadakan koordinasi dengan Panitera Pengganti perkara permohonan.
- c. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan.
- d. Urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata permohonan.

## 9) Panitera Muda Hukum

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara serta melakukan pengurusan administrasi, pembinaan hukum agama dan hisab rukyat dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.
- c. Menerima, menencatat, mengolah, menyalurkan surat-surat masuk/keluar sub kepaniteraan perkara.
- d. Menghimpun, mengola, membukukan dan mengajukan pertimbangan hukum.
- e. Mempersiapkan rencana rumusan nasehat dan pertimbangan hukum.
- f. Mempersiapkan penyelenggaraan islah terhadap pertentangan faham dalam agama.
- g. Merumuskan pedoman penentuan arah kiblat, waktu shalat, awal dan akhir bulan qamariah.
- h. Mengatur dan mengurus pengambilan sumpah menurut hukum agama.
- i. Mempersiapkn data perkara dan menyusun statistik dan dokumentasi Pengadilan Agama.
- j. Mempersiapkan pemberian bimbingan Pengadilan Agama di bidang hukum Syara, statistik dandokumentasi serta ketatalaksanaannya.
- k. Menyusun laporan kegiatan sub kepaniteraan Hukum.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Panitera.
- m. Menghimpun Klipping hukum yang berkaitan dengan Pengadilan Agama.

### 10) Panitera Pengganti

- a. Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara.
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut berdasarkan sumpah jabatan pada waktu melaksanakan tugas
- c. Mencatat selengkapnya segala yang terjadi berkaitan dengan para pihak selama persidangan dalam bentuk berita acara yang kemudian merupakan tanggung jawab segala isi dari berita acara tersebut.
- d. Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan Ketua Majelis.
- e. Membantu hakim dalam bentuk menyusun/ menyelesaikan putusan/ penentapan.
- f. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda.
- g. Menyusun dan menjahit berkas B terhadap perkara banding yang ditangani.

### **B. Proses Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A**

*Takharruj* adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara syar'i). Dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang dari salah seorang ahli waris lainnya. Hal ini dalam syariat Islam dibolehkan. Syariat Islam juga memperbolehkan salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, kemudian diberikan kepada ahli waris yang lain atau yang ditunjuknya. Kasus seperti ini di

kalangan ulama faraidh dikenal dengan istilah “pengunduran diri” atau “menggugurkan diri dari hak warisnya”.<sup>33</sup>

عن أبي يوسف عن حدثه عمرو بن دينار عن ابن عباس : ان حدى نساء  
عبدالرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة وثمانين الف على اخرجوها من ميراث.

Artinya:

“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”.<sup>34</sup>

Pembagian warisan dalam bentuk *takharruj* merupakan bentuk pembagian secara damai diantara ahli waris yang mengedepankan prinsip musyawarah dan kerelaan. Tidak berpatokan pada pembagian warisan 2 : 1 yang telah ditentukan dalam kewarisan Islam tetapi bagian masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan kesepakatan dari para ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Makassar, Syahidal menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, pembagian warisan secara damai adalah sesuatu yang ingin dicapai sebab Islam sangat menghindari terjadinya sengketa atau perpecahan diantara para ahli waris. Untuk itu selalu diupayakan mediasi dalam setiap perkara kewarisan yang disengketakan di Pengadilan Agama melalui peran mediator.<sup>35</sup>

Sebagian masyarakat juga sudah terlebih dulu mengambil harta keluarga mereka sebelum pewaris meninggal dunia, dengan alasan supaya pewaris dapat ikut menyelesaikan dan menentukan pembagian warisan dalam keluarganya. Seperti

<sup>33</sup> Abu Umar Baasyir, *Al Faroidh Warisan*, (Jakarta: Tanah Suci, 2006), h.211.

<sup>34</sup> Zilfaroni, *Analisis terhadap pendapat Hanafiah tentang Tahkaruj* (<https://zilfaroni-putratanjung.blogspot.co.id/2012/05/analisis-terhadap-pendapat-hanafiah.html>), h. 1. (diakses tanggal 15 November 2017)

<sup>35</sup> Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 8 Desember 2017.



yang kita ketahui syarat sahnya suatu warisan dapat dibagi kepada ahli waris yakni dengan meninggalnya pewaris, maksudnya pewarisan dapat berlangsung setelah pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Peralihan harta seseorang yang masih hidup, tidak dapat disebut sebagai kewarisan menurut hukum Islam. Peralihan tersebut mungkin saja dalam bentuk hibah atau wasiat dan ditujukan kepada siapa yang ia kehendaki. Adapun kematian yang dimaksud dimana harta warisannya juga secara otomatis atau mutlak beralih kepada ahli warisnya, ialah mati hakiki ataupun mati hukmi.<sup>36</sup>

Yang dimaksud dengan mati hakiki adalah kematian yang dapat dibuktikan atau disaksikan oleh orang banyak melalui panca indera. Sedangkan yang dimaksud dengan mati hukmi adalah kematian pewaris berdasarkan putusan atau ketetapan hakim. Maksudnya secara yuridis ia telah meninggal atau orang yang hilang tanpa diketahui keberadaannya. Demikian juga halnya tawanan yang tidak diketahui keberadaannya dan orang yang murtad dari agama.<sup>37</sup>

Menurut Shafar Arfah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar. Masyarakat lebih banyak memilih untuk menyelesaikan perkara kewarisannya secara sendiri-sendiri dan kekeluargaan tanpa merasa perlu mendaftarkannya di Pengadilan Agama, hal ini dibuktikan oleh sedikitnya perkara tentang kewarisan yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar setiap tahunnya.<sup>38</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Syahidal, hakim Pengadilan Agama Makassar. Beliau menjelaskan bahwa pembagian warisan secara damai dalam bentuk *tahkarruj* secara hukum adalah sah dilakukan selama pembagian tersebut

---

<sup>36</sup> Abu Umar Baasyir, *Al Faroidh Warisan*, h.101.

<sup>37</sup> Abu Umar Baasyir, *Al Faroidh Warisan*, h.101.

<sup>38</sup> Shafar Arfah. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, wawancara, Makassar, 12 Desember 2017.

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau hasil musyawarah diantara ahli waris.<sup>39</sup>

Dalam proses beracara di Pengadilan Agama, menurut bapak Syahidal, terlebih dahulu diupayakan proses mediasi sebelum masuk kepada pokok perkara. Dalam sengketa kewarisan mediator harus mengarahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencari jalan damai dari permasalahan waris. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008:<sup>40</sup>

Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

Pada PERMA RI, tidak hanya diwajibkan bagi hakim untuk mengikuti prosedur mediasi tetapi juga mewajibkan majelis hakim memasukkan dalam salah satu pertimbangan hukumnya tentang perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.<sup>41</sup>

Dalam Pasal 130 ayat (1) jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab-menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Akibatnya pemeriksaan:<sup>42</sup>

1. Dianggap tidak sah
2. Pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum.

Jika kedua pihak yang berperkara menemukan kesepakatan damai dengan memilih pembagian dalam bentuk *tahkarruj*, hal itu adalah sah dilakukan sepanjang

---

<sup>39</sup> Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 8 Desember 2017.

<sup>40</sup> Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 8 Desember 2017.

<sup>41</sup> Harijah Damis, *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai*, h.158

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.240.

terjadi kerelaan dan kesepakatan oleh masing-masing pihak. Hal ini dibolehkan demi tercapainya kemaslahatan para ahli waris. Kaidah fikih menjelaskan bahwa apabila sesuatu perbuatan hukum menghasilkan kemaslahatan, disanalah hukum Allah. Hakekat maslahat adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari bencana.<sup>43</sup>

Pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* dipilih selain karena adanya sengketa yang terjadi diantara ahli waris, dapat juga dipilih sebagai metode pembagian warisan oleh ahli waris tanpa ada sengketa sebelumnya. Hal ini dibenarkan selama ahli waris sepakat dan rela untuk melakukan pembagian warisan dalam bentuk ini, dan selama masing-masing pihak memilih bentuk pembagian tersebut sebagai sesuatu yang adil bagi mereka.<sup>44</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 disebutkan bahwa:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>45</sup>

Pasal tersebut telah menjelaskan tentang pembagian warisan yang dilakukan secara damai diantara ahli waris setelah masing-masing mengetahui bagian yang seharusnya mereka terima, hal tersebut juga menjadi acuan dalam pembagian warisan secara *takharruj*, dimana pembagian secara *takharruj* dilakukan sesuai kesepakatan guna menghasilkan perdamaian dan dapat dilaksanakan sekalipun tanpa didahului oleh sengketa atau perselisihan terlebih dulu.

Wujud pelaksanaan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama dapat berupa perkara gugatan atau sengketa dan dapat pula melalui pembagian warisan diluar sengketa. Untuk wujud pembagian harta warisan di luar sengketa di Pengadilan Agama didaftarkan melalui permohonan pertolongan pembagian harta

---

<sup>43</sup> Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 8 Desember 2017.

<sup>44</sup> Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 8 Desember 2017.

<sup>45</sup> Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, BAB III Pasal 183.

warisan di luar sengketa (P3HP), dimana proses pembagiannya dibantu oleh ketua Pengadilan Agama.

Pembagian dalam bentuk *tahkharruj* menurut Syahidal, bukan dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari aturan pembagian yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi untuk memberikan bagiannya kepada masing-masing ahli waris berdasarkan hasil musyawarah mereka yang membuat kesepakatan tersebut setelah mereka mengetahui bagian yang seharusnya diterima. Sebab dibolehkannya pembagian warisan dalam bentuk ini juga semata-mata untuk kemaslahatan dari ahli waris.<sup>46</sup>

Adapun cara pembagian warisan dalam bentuk *takharruj* yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kedua pihak yang bersengketa menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa atau perselisihannya secara damai berdasarkan kesepakatan.
- b. Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris, terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri.
- c. Pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris.
- d. Bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri.
- e. Sisa yang dijadikan barter atau tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing.

Apabila terjadi perdamaian, mediator merumuskan isi kesepakatan para pihak yang bersengketa dan dibuat akte perdamaian. Setelah akte perdamaian selesai dan dibacakan kepada para pihak, mediator melaporkan hasil kesepakatan

---

<sup>46</sup> Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, wawancara, Makassar, 8 Desember 2017.

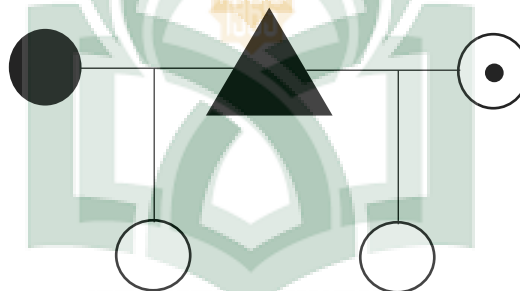
<sup>47</sup> Harijah Damis, *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai*, h. 127.

yang telah dibuat kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Majelis hakim yang menerima laporan perdamaian dari mediator, membacakan hasil perdamaian dan dimasukkan dalam putusan akhir.

**C. Kelebihan dan Kekurangan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A**

Dalam pelaksanaan pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* di Pengadilan Agama tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada di dalamnya. Kekurangan dan kelebihan ini juga yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para ahli waris dalam menentukan cara pembagian warisan.

*Bagan:*



*Ket:*

- : Almarhum Saturi (suami pertama almarhumah Sangnging bin Tahe)
- ▲ : Almarhumah Sangnging bin Tahe
- ⊙ : Subu (suami kedua almarhumah Sangnging bin Tahe) (Penggugat II)
- : Syarifuddin (anak Almarhum Saturi dan Almarhumah Sangnging bin Tahe)
- : Suriyanto (anak dari Subu dan Almarhumah Sangnging bin Tahe) (Penggugat I)

Pada contoh perkara kewarisan dengan putusan Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA MKs. Dalam perkara tersebut penggugat dalam hali ini merupakan suami dan anak kandung pewaris. Suriyanto (Penggugat I) dan Subu

(Penggugat II) menggugat harta warisan mereka terhadap Syarifuddin (Tergugat) yang merupakan anak kandung laki-laki pewaris dari suami yang berbeda, sebab seluruh harta warisan dikuasai oleh tergugat. Perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama Makassar.

Pada proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan mengadakan perdamaian. Kedua pihak sepakat atas pembagian harta warisan pewaris dengan rincian sebagai berikut:

**Bagian Pihak I (Penggugat I)**

Sebidang tanah darat terletak di jalan Dusun Bentenge, Kelurahan Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, seluas kurang lebih 379 M2 (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), sebahagian dari sertifikat Hak Milik Nomor 00533/Bonto Mate'ne, Surat Ukur Nomor 00396/2003, tanggal 02-09-2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Daeng Cupe
Sebelah Barat	: batas tanah/sawah
Sebelah Selatan	: Rencana jalanan
Sebelah Timur	: Tanah H. Rudding Pammase

**Bagian Pihak II (Penggugat II)**

Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya di jalan Bung lorong 7 Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 22455, Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor 1646/Tamalanrea Jaya/2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik Baso
Sebelah Barat	: Tanah/rumah Dg. Mammu

Sebelah Selatan : Tanah Daeng Ngitung

Sebelah Timur : Tembok Batas Perumahan

Disamping itu, guna menambah bagian warisan Penggugat I dan Penggugat II, maka Tergugat memberikan uang kontan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak I.

Pada perkara tersebut, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam proses mediasi. Masing-masing pihak menggunakan kesempatan mediasi dengan baik untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluarnya tanpa harus meneruskan perkara ke tahap persidangan selanjutnya. Kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara kewarisan secara damai dalam bentuk *takharruj* dimana Penggugat I (pihak I) mengundurkan diri dari hak warisnya, dan sebagai gantinya ia diberikan sejumlah uang tunai dari Tergugat.

Hasil perdamaian tersebut yang diserahkan oleh mediator kepada hakim, dan hakim membacakan hasil perdamaian yang mereka sepakati dan memasukkan hasil tersebut kedalam putusan akta perdamaian. Masing-masing pihak merasa puas dan perkara dapat terselesaikan dengan damai. Perdamaian yang terjadi seperti pada contoh perkara tadi menurut Syahidal, merupakan salah satu kelebihan dari pembagian dalam bentuk *takharruj* dimana perselisihan yang ada dapat segera dihentikan dan masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar terbaik dari masalah kewarisan yang mereka hadapi. Harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan yang telah mereka sepakati dan musyawarahkan bersama dan harta warisan dapat langsung dimanfaatkan dan dinikmati untuk kepentingan keluarga.<sup>48</sup>

Syahidal menjelaskan juga bahwa kelebihan dari pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama adalah

---

<sup>48</sup> Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 8 Desember 2017.



menghindari terjadinya perselisihan diantara para ahli waris dikemudian hari, sebab semuanya telah diselesaikan dalam suatu kesepakatan dan kerelaan sesuai yang diharapkan masing-masing pihak serta disahkan oleh putusan Pengadilan Agama.<sup>49</sup>

Sebab terkadang ahli waris merasa pembagian warisan berdasarkan pengaturan hukum Islam dengan perbandingan laki-laki mendapat dua bagian, perempuan mendapat satu bagian dianggap tidak adil. Sebagai contoh: seorang anak laki-laki menuntut pendidikan atau dengan kata lain ia disekolahkan oleh orang tua dengan mendapat dua bagian dari warisan, sementara seorang perempuan yang dinikahkan lebih awal mendapat satu bagian. Jelas saja hal tersebut dirasa tidak adil jika dilihat dari jumlah dana yang dikeluarkan untuk keduanya. Dan biasanya hal tersebut menimbulkan perselisihan.

Disamping itu dari segi biaya yang dibutuhkan, penyelesaian perkara kewarisan secara damai ini tidak memerlukan biaya perkara sebesar biaya perkara apabila perkara dilanjutkan. Hubungan silaturahmi diantara keluarga pun dapat terjalin dengan baik kembali seiring perdamaian yang dilakukan dalam bentuk takharuj ini. Hal itulah yang menjadi tujuan pewaris yang berjuang dalam kehidupannya memperoleh harta untuk dinikmati anak dan keturunannya, bukan untuk dipertentangkan dan melahirkan silang sengketa.

Dari gambaran perkara di atas, pembagian warisan yang dilakukan dimana salah seorang ahli waris mengundurkan diri dari menerima warisannya dibenarkan meskipun pembagiannya tidak mengikuti aturan pembagian warisan dalam hukum Islam. Kekurangan yang harus dilengkapi yaitu perlu disebutkan pada akta perdamaian tentang kedudukan dan besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam terlebih dahulu. Apabila dalam pembagian

---

<sup>49</sup> Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 8 Desember 2017.



yang disepakati terdapat ahli waris yang menerima kurang dari porsi bagiannya seperti pada contoh perkara tadi, seharusnya ada pernyataan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain, sebab kerelaan adalah syarat dalam transaksi bermuamalah, termasuk pembagian harta warisan.<sup>50</sup>

Penyebutan kedudukan dan besarnya porsi bagian masing-masing ahli waris dalam akta perdamaian merupakan salah satu bentuk sosialisasi tentang hukum kewarisan Islam. Putusan hakim khususnya perkara warisan paling tidak dibaca oleh pihak yang bersengketa, sehingga yang membacanya dapat memahami kedudukan dan bagiannya dalam hukum kewarisan.<sup>51</sup>

#### ***D. Analisis Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A***

Secara substansi, pembagian warisan dalam bentuk *takharruj* sama dengan praktik pembagian harta warisan secara damai di Pengadilan Agama yang menjadi obyek penelitian penulis. Sisi persamaannya adalah pembagian harta warisan secara damai berdasarkan prinsip musyawarah. Para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat tentang bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini berdasarkan keinginan para ahli waris yang telah disepakati secara bersama-sama.

Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehan nya yaitu adanya keridaan (kerelaan) masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada:

---

<sup>50</sup> Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 8 Desember 2017.

<sup>51</sup> Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 8 Desember 2017.

**Q.S. al-Nisa/4: 29 :**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>52</sup>

Ayat di atas memberi petunjuk tata cara memperoleh harta yang halal untuk dimakan, yakni dengan jalan perniagaan (transaksi jual beli) atas keridhaan masing-masing pihak. *takharruj* dan praktik pembagian harta warisan secara damai di pengadilan Agama dilakukan atas dasar keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak.

Selain itu, tujuan *takharruj* maupun pembagian harta warisan secara damai di Pengadilan Agama adalah untuk kemaslahatan para ahli waris. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih.

این ما تكون الصلحة فثم شرع الله

Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa apabila sesuatu perbuatan hukum menghasilkan kemaslahatan, disanalah hukum Allah. Hakekat maslahat adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari bencana. Dalam pandangan ahli ushul maslahat adalah memberikan hukum syara' kepada sesuatu yang tidak terdapat dalam *nash* dan *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Solo: Abyan, 2014), h. 84.

<sup>53</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jus 6 (Jakarta: Pt. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 86.

Kelebihan yang dihasilkan dari pembagian harta warisan secara damai adalah:

1. Persengketaan antara ahli waris bisa berakhir. Berakhirnya persengketaan ahli waris, berarti merajut dan terjalin hubungan *silaturrahim* antara ahli waris.
2. Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa warisan berlanjut, sepanjang itu pula konflik akan mewarnai kehidupan para ahli waris yang sedang bersengketa, bahkan konflik keluarga dapat berlanjut kepada keturunan masing-masing, karena bibit permusuhan akan menurun kepada keturunan masing-masing.
3. Harta warisan segera terbagi dan dapat dinikmati oleh semua ahli waris dengan segera, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan memberi kebahagiaan bagi kehidupan keluarga karena untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, salah satu harus ditopang oleh harta yang cara perolehannya dengan jalan yang halal, dan hal itu pula menjadi tujuan pewaris yang berjuang dalam kehidupannya memperoleh harta untuk dinikmati anak keturunannya, bukan untuk dipertentangkan dan melahirkan silang sengketa.

Ada banyak kelebihan dari pembagian warisan secara damai, yang dapat kita peroleh. Dari banyaknya kelebihan yang ada, masyarakat enggan atau tidak ingin menyelesaikan sengketa kewarisannya secara damai. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan dengan jalan damai masih sangat minim dibandingkan dengan sengketa yang diselesaikan di ruang persidangan. Selain minimnya perkara kewarisan yang diselesaikan secara damai, hal ini juga membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari kecenderungan untuk

menguasai harta hingga membuatnya lupa jika segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah swt.

Dalam praktik pembagian harta warisan secara damai pada Pengadilan Agama yang menjadi obyek penelitian penulis ditemukan perbedaan-perbedaan dengan teori *takharruj*, sehingga ada beberapa hal yang perlu disebutkan pada pasal-pasal perdamaian pembagian harta warisan yang tentunya atas petunjuk dan arahan mediator maupun majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan.

Hal-hal yang perlu dilengkapi sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu terdapat pasal yang menyebut kedudukan dan besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam.
2. Apabila dalam pembagian yang disepakati terdapat ahli waris yang menerima kurang dari porsi bagiannya, misalnya untuk anak laki-laki dan perempuan disepakati menerima bagian yang sama besar, harus ada pernyataan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain. Kerelaan adalah syarat dalam transaksi bermuamalah, termasuk muamalah pembagian harta warisan.

Penyebutan kedudukan dan besarnya porsi bagian masing-masing ahli waris dalam akta perdamaian merupakan salah satu bentuk sosialisasi tentang hukum kewarisan Islam, sekaligus realisasi pelaksanaan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan hukum kewarisan Islam. Putusan hakim khususnya perkara warisan paling tidak dibaca oleh pihak yang bersengketa, sehingga yang membacanya dapat memahami kedudukan dan bagiannya dalam hukum kewarisan Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A adalah sah dan boleh dilaksanakan sepanjang masing-masing pihak atau ahli waris menyepakati dan iklas tanpa paksaan dalam proses pembagian warisan tersebut. Hal ini dibenarkan demi kemaslahatan diantara para ahli waris.

Adapun cara pembagian warisan dalam bentuk *takharruj* yaitu:

- a. Kedua pihak yang bersengketa menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa atau perselisihannya secara damai berdasarkan kesepakatan.
- b. Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris, terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri.
- c. Pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris.
- d. Bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri.
- e. Sisa yang dijadikan barter atau tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing.

2. Kelebihan dalam pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* adalah merupakan kesepakatan bersama para ahli waris sehingga setelah putusan damai dibacakan oleh hakim bisa dipastikan tidak akan ada lagi perselisihan berikutnya mengenai harta warisan tersebut sebab ahli waris sendiri yang menentukan dan menyepakati pembagian warisan dalam bentuk *takharruj* tersebut. Pembagian warisan pun dapat segera dilaksanakan dan harta warisan segera dimanfaatkan untuk kebutuhan ahli waris. Adapun kekurangannya pada pasa-pasal perdamaian seharusnya disebutkan kedudukan dan bagiannya dari masing-masing ahli waris terlebih dahulu sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Setelah disepakati terdapat ahli waris yang mengundurkan diri atau menerima bagian yang kurang, maka harus ada pernyataan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris yang lain. Karena ini merupakan syarat dalam transaksi muamalah.

## **B. Implikasi**

1. Bagi Pemerintah, diharapkan lebih menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan, dan perlu adanya sosialisasi terkait penyelesain sengketa secara damai melalui musyawarah atau mufakat agar sengketa yang terjadi di masyarakat khususnya kewarisan dapat segera terselesaikan.
2. Bagi Mediator, dalam proses mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama sebaiknya mediator benar-benar menjalankan fungsinya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara mengenai harta warisan, agar ahli waris dapat berdamai dalam pembagian harta warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam* Cet. 1. Bandung: CV. DIPONEGORO, 1995.
- , *Hukum Waris*. Solo: CV. PUSTAKA MANTIQ, 1994.
- , *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis* Cet. 1. Bandung: TRIGENDA KARYA, 1995.
- Baasyir, Abu Umar . *Al Faroidh Warisan*. Jakarta: Tanah Suci, 2006.
- Bisri, Adib dan Munawir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia* Cet. 1. Surabaya: PUSTAKA PROGRESIF, 1999.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Damis, Harijah. *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai*. Jakarta: MT.Al-Itqon, 2012.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Solo: Abyan, 2014.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Konsultasi Waris Islam, *Ayat dan Hadist Sumber Rujukan Pembagian Warisan Secara Islam*, <http://www.jadipintar.com.Ayat-dan-Hadits-Sumber-Rujukan-Pembagian-Waris-Secara-Islam.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017 Pukul 17.20 WITA.
- Mardani, *Hukum Kewarisan islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhibbin, Moh. Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika, 2009.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, BAB III Pasal 183.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Salman, H.R. Otje . *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Mediatama, 2006.

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1995.

Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia* Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2012.

Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'I, Hazairin, dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafik, 2003.

Zilfaroni, *Hukum Kewarisan Islam*, <http://zilfaroni-putratanjung.blogspot.co.id/2012/05/hukum-kewarisan-islam.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2017 Pukul 16.15 WITA.





# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Kampus I Jl. Sultan Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : Tahun 2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 205 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**M E M U T U S K A N**

1. **Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. DR. H. Supardin, M.H.I.  
2. Drs. H. Muh. Jamal Jamil, S.Ag.

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Nur Atira Ali

NIM : 10100114058

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Peradilan

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SECARA DAMAI DALAM BENTUK TAKHARUJ DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA.

- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa

Pada tanggal : 12-06-2017



Dr. Darussalam, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

## PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang berjudul, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharuj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A", yang disusun oleh Nur Atira Ali, NIM: 10100114058, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar proposal skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 M, bertepatan dengan 7 Safar 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian (dengan beberapa perbaikan).

Demikian pengesahan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 16 November 2017 M  
27 Safar 1439 H

Pembimbing I



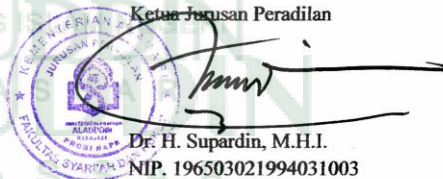
Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003

Pembimbing II



Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.  
NIP. 196910042000031002

Disahkan oleh:  
Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 16548/S.01P/P2T/11/2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4718/SH.01/PP.00.9/11/2017 tanggal 29 November 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NUR ATIRA ALI  
Nomor Pokok : 10100114058  
Program Studi : HAPK  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SECARA DAMAI DALAM BENTUK TAKHARUJ DI  
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Desember 2017 s/d 04 Januari 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 30 November 2017

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



## PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14  
Telp. : 0411-4794556 Fax : 0411-4794557  
Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id  
MAKASSAR 90243

### SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/1073/PB.00/III/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar  
Klas IA menerangkan bahwa :

Nama : **NUR ATIRA ALI**  
NIM : 10100114058  
Program Studi : HAPK  
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam  
Bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Klas IA"

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan  
Agama Makassar Klas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Makassar, 16 Maret 2018



Muhammad Wahdi, S.H., M.H.  
NIP. 19671210199302003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa  
 Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
 Nomor : 107 Tahun 2018

**T E N T A N G**  
**PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2018**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Pemohonan  
 Nama : Nur Atira Ali  
 N I M : 10100114058  
 Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Keluarga  
 Hari/Tanggal : Jumat, 23 Maret 2018  
 Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
 Judul : "Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
 6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 Sekretaris : Dr. Hj. Patimah, M.Ag  
 Penguji I : Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag  
 Penguji II : Dr. Fatmawati, M.Ag  
 Pelaksana : 1. Dra. Hj. Wahida Rahim, M.M  
 2. Muh. Amzar, S.Ag
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat *kekkeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.*
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Samata Gowa  
 Pada tanggal 21 Maret 2018

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

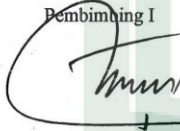
### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharuj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A" yang disusun oleh Nur Atira Ali, NIM: 10100114058, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah melaksanakan penelitian, diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 19 Maret 2018 M  
02 Rajab 1439 H

Pembimbing I



Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196406011993031303

Pembimbing II



Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M. Ag.  
NIP. 196910042000031002

Diketahui oleh :  
Kepada Jurusan/Prodi



Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 565 Tahun 2018

**T E N T A N G**

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF) TAHUN 2018  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :**

- Membaca** : Surat Permohonan **Nur Atira Ali**, NIM : 10100114058 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi **HAPK** tanggal 23 Maret 2018 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Keputusan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tentang Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif

**Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, Sebagai Berikut :

NO	NAMA / NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KET/SEK/ANGG
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/DIS	MKKP	
1	Nur Atira Ali 10100114058	Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag	Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	Dr. H. Supardin, M.H.I.	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag St. Sumarni Am, S.H Basyirah Mustarin, S.H, M.H

**Kedua** : Tugas **Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;

**Ketiga** : Tugas **Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;

**Keempat** : Tugas **Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;

**Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;

**Keenam** : **Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditandatangani : Samata Gowa  
Pada tanggal : Maret 2018

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
(NIP. 19621016 199003 1 003)

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa. (Sebagai Laporan)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa  
Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
Nomor : 620 Tahun 2018  
T E N T A N G  
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2018**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan  
N a m a : Nur Atira Ali  
N I M : 10100114058  
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Keluarga  
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : "Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk Takharus di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :  
Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag  
Penguji I : Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag  
Penguji II : Dr. Fatmawati, M.Ag  
Pelaksana : 1. Nurhayati Wahid  
2. Nasirah Asri, S.Kom
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata Gowa  
Pada tanggal : 27 Maret 2018  
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa; (Sebagai Laporan)

#### AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, 21 Oktober 2013 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

**Surianto bin Subu**, Agama Islam, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 28 Januari 1989, bertempat tinggal di Jalan Bung Lorong 7 Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, **Penggugat I;**

**Subu** , Agama Islam, lahir di Pangkajene Kepulauan pada tanggal 31 Desember 1946, bertempat tinggal di Jalan Bung Lorong 7 Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat II;**

Dalam hal ini di wakili kuasa hukumnya **CH.NAHARUDDIN ABDULLAH, SH**, Advokat, Agama Islam, berkedudukan di Makassar, Jln. Bung, Komp. Perumahan Bumi Bung Permai, blok D Nomor 5. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tanggal 5 September 2013;

melawan

**Syarifuddin bin Satturi**, bertempat tinggal di Jalan Bung Lorong 7 Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian sebagai berikut;

Pada hari ini, Kamis tanggal 3 Oktober 2013, dalam proses mediasi yang kedua perkara Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA Mks, antara :

**Surianto bin Subu**, agama Islam, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 28 Januari 1989, bertempat tinggal di jalan Bung Lorong 7 Nomor 10, Kelurahan

Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, disebut sebagai **Pihak I**;

**Subu**, Agama Islam, lahir di Pangkajene Kepulauan pada tanggal 31 Desember 1946, bertempat tinggal di Jalan Bung Lorong 7 Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pihak II**;

melawan

**Syarifuddin bin Satri**, bertempat tinggal di jalan Bung lorong 7 nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, disebut sebagai **Pihak II**;

Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri sengketa dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Bahwa kedua belah sepakat atas pembagian harta warisan pewaris almarhumah Sangging bin Tahe (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) dengan rincian pembagian sebagai berikut :

#### **Bagian Pihak I**

Sebidang tanah darat terletak di jalan Dusun Bentenge, Kelurahan Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, seluas kurang lebih 379 M2 (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), sebahagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00533/ Bonto Mate'ne, Surat Ukur Nomor 00396/2003, tanggal 02-09-2003 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Daeng Cupe

Sebelah Barat : batas tanah/sawah

Sebelah Selatan : Rencana jalanan

Sebelah Timur : Tanah H. Rudding Pammase

Disamping itu, guna menambah bagian warisan Penggugat I dan Penggugat II, maka Tergugat memberikan uang kontan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak I;

#### **Bagian Pihak II**

Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya di jalan Bung lorong 7 Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik No. 22455, Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor 1646/Tamalanrea Jaya/ 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Baso

Sebelah Barat : Tanah/rumah Dg. Mammu

Sebelah Selatan : Tanah Daeng Ngitung

Sebelah Timur : Tembok batas perumahan

#### **Pasal 3**

Bahwa Pihak II bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan pada perkara ini;

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator yang disaksikan oleh Kuasa Hukum Pihak I;

Setelah surat perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perdamaian.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **PUTUSAN**

Nomor 1379/ Pdt.G/ 2013/PA Mks

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 1338 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, serta ketentuan – ketentuan hukum yang bersangkutan.

#### Mengadili

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut yang telah disepakati;
- Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah. oleh kami Dr. Hj. Harijah D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. .H.M. Anas Malik, S.H.,M.H. dan Drs. Mahmudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Husaima, S.H.I. sebagai panitera pengganti., dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H.M. Anas Malik, S.H.,M.H.

Dr. Hj. Harijah D, M.H.

Ttd.

Drs. Mahmudin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Husaima, S.H.I.

#### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 211.000,-**

**(dua ratus sebelas ribu rupiah)**

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Makassar

Drs. H. Jamaluddin













## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Atira Ali, lahir di Bone pada tanggal 12 Maret 1996.

Anak ke-tiga dari 8 bersaudara dari pasangan Drs.

Muhammad Ali Musa, M.M. dan Dra. Aryani ini

dibesarkan di keluarga yang sederhana. Pada Tahun 2002

penulis di sekolahkan di TK Pertiwi 1 Sinjai, kemudian

penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Negeri No.

23 Sinjai dan menyelesaikan SD nya pada tahun 2008. Pada Tahun 2011 Penulis

menyelesaikan studi Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sinjai kemudian

melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sinjai dan

menyelesaikan studi SMA pada tahun 2014. Setelah lulus, penulis melanjutkan

jenjang pendidikannya di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar pada tahun 2014 Jurusan Peradilan dan dapat meraih gelar Sarjana

Hukum (S.H.) pada tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR